



PT. BPRS
Bank Syariah Patriot
BANK MILIK KOTA BEKASI (perseroda)



LAPORAN TATA KELOLA

PT. BPRS PATRIOT BEKASI (PERSERODA)

2023

PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) terdaftar dan diawasi OJK
dan merupakan peserta penjaminan LPS



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Alamat : Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Blok A3 No. 1 Jalan Ahmad Yani
Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan
Nomor Telepon : 0218860708
Penjelasan Umum : Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah
dilaksanakan guna menerapkan tata kelola perusahaan yang baik
agar BPRS selalu menerapkan prinsip syariah dalam setiap bisnis
dan kegiatannya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Fasihul Islam	Direktur Utama	Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS
2	Nuraeni	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional serta menerapkan fungsi kepatuhan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas dan meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional sesuai dengan rekomendasi oleh Dewan Komisaris

Keterangan

Jumlah anggota Direksi pada tahun 2023 belum memenuhi ketentuan yang tertuang dalam POJK Tata Kelola dikarenakan sedang dalam proses pengajuan calon anggota Direksi. PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) mengajukan permohonan calon anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang untuk mengisi posisi Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan. Melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 17 November 2023 Nomor SR-8/KO.1111/2023 perihal Keputusan atas Pencalonan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPRS Patriot Bekasi ditetapkan bahwa Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyetujui saudara Fasihul Islam sebagai calon Direktur Utama PT. BPRS Patriot Bekasi dan tidak menyetujui Saudari Endah Prawanti sebagai calon Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. BPRS Patriot Bekasi. Dan Pada akhir posisi 31 Desember 2023, belum diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat saudara Fasihul Islam sebagai Direktur Utama PT. BPRS Patriot Bekasi. Dengan ini susunan anggota Direksi PT. BPRS Patriot Bekasi (perseroda) posisi 31 Desember 2023 adalah Fasihul Islam menjabat sebagai Plt. Direktur Utama dan Nuraeni menjabat sebagai Direktur Operasional yang Membawahkan fungsi Kepatuhan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Drs. Nadih Arifin, M.Si	Komisaris Utama	Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara independen sehingga keputusan yang diambil objektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun

Rekomendasi kepada Direksi

Dewan Komisaris merekomendasikan dan mengarahkan kepada anggota Direksi untuk mengupayakan pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas dan meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional untuk kemajuan BPRS

Keterangan

Jumlah anggota Dewan Komisaris pada tahun 2023 belum memenuhi ketentuan yang tertuang dalam POJK Tata Kelola dikarenakan sedang dalam proses pengajuan calon anggota Dewan Komisaris. PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) mengajukan permohonan calon anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang untuk mengisi posisi Komisaris Utama dan Komisaris. Melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 17 November 2023 Nomor SR-8/KO.1111/2023 perihal Keputusan atas Pencalonan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPRS Patriot Bekasi ditetapkan bahwa Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan menyetujui saudara Drs. Nadih Arifin, M.Si sebagai calon Komisaris Utama PT. BPRS Patriot Bekasi dan menyetujui Saudara Abrapuspa Ghani Talattov sebagai calon Komisaris PT. BPRS Patriot Bekasi. Dan Pada akhir posisi 31 Desember 2023, belum diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat saudara Drs. Nadih Arifin, M.Si sebagai Komisaris Utama dan Abrapuspa Ghani Talattov sebagai Komisaris PT. BPRS Patriot Bekasi. Dengan ini susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPRS Patriot Bekasi (perseroda) posisi 31 Desember 2023 adalah Drs. Nadih Arifin, M.Si sebagai Plt. Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	KH Mir'an Syamsuri	Ketua DPS	Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan prinsip Syariah
2	Muhammad Aiz	Anggota DPS	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS sesuai dengan prinsip Syariah

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Dewan Pengawas Syariah merekomendasikan dan memberikan nasihat dan saran kepada anggota Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
112/BPRS/Dir/VII/23	26-07-2023	037/BPRS/Dir/I/2024	25-01-2024

Keterangan

Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Patriot Bekasi (Pemeroda) berjumlah 2 orang dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS di lembaga keuangan syariah lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) belum membentuk komite dan akan segera dibentuk sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam POJK Tata Kelola setelah ditetapkannya pengurus secara definitif baik pada posisi Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris yang diproyeksikan akan dapat dilaksanakan melalui mekanisme RUPS-LB diawal tahun 2024.

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Fasihul Islam	0	0,00	nihil	0,00
2	Nuraeni	0	0,00	nihil	0,00

Keterangan

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Fasihul Islam	nihil	nihil	nihil
2	Nuraeni	nihil	nihil	nihil

Keterangan

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS Patriot Bekasi

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Fasihul Islam	nihil	nihil	nihil
2	Nuraeni	nihil	nihil	nihil

Keterangan

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota direksi lainnya, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP BPRS yang bersangkutan

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Drs. Nadih Arifin, M.Si	0	0,00	nihil	0,00

Keterangan

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada BPRS dan Perusahaan lainnya

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Drs. Nadih Arifin, M.Si	nihil	nihil	nihil

Keterangan

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS Patriot Bekasi

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Drs. Nadih Arifin, M.Si	nihil	nihil	nihil

Keterangan

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan/atau PSP BPRS yang bersangkutan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	Drs. Nadiyah Arifin, M.Si	Aparatur Sipil Negara	Kepala BKPSDM Kota Bekasi

Keterangan

Plt. Komisaris yang saat ini menjabat di BPRS Patriot Bekasi adalah keputusan dari Pemegang Saham Pengendali yang berlandaskan Akta Nomor 2 tanggal 04 Mei 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPRS Patriot Bekasi dan SK Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.09-0114775 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BPRS Patriot Bekasi tanggal 08 Mei 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	710.400.000,00	1	113.664.000,00	2	191.808.000,00
2.	Tunjangan	2	863.040.000,00	1	0,00	2	115.680.000,00
3.	Tantiem	2	756.704.976,00	1	0,00	2	67.272.963,00
4.	Bonus	2	662.260.000,00	1	31.837.333,00	2	100.652.000,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	0,00	1	0,00	2	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	333.280.000,00	1	0,00	2	116.520.963,00
	Total Remunerasi		3.325.684.976,00		145.501.333,00		591.933.926,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	0,00	1	0,00	2	0,00
2.	Transportasi	2	0,00	1	0,00	2	0,00
3.	Kesehatan	2	41.627.051,00	1	0,00	2	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	52.398.000,00	1	0,00	2	0,00
	Total Fasilitas Lain		94.025.051,00		0,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		3.419.710.027,00		145.501.333,00		591.933.926,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Total remunerasi yang tercatat adalah data real yang dikeluarkan oleh BPRS selama tahun 2023 dengan memperhitungkan kondisi yang terjadi didalam BPRS diantaranya kebijakan atas jabatan Komisaris dan Direktur Utama yang masih ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,08
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,24
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	5,54
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,14
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	2,57

Keterangan

Rasio gaji yang tercatat adalah data real yang dikeluarkan BPRS selama tahun 2023 dengan memperhitungkan kondisi yang terjadi didalam BPRS diantaranya kebijakan atas jabatan Komisaris dan Direktur Utama yang masih ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), untuk rasio gaji anggota Dewan Komisaris terisi 1.00 karena tidak ada pembanding rasio

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	05-01-2023	8	Evaluasi kinerja keuangan Desember 2022 dan pembahasan hasil KAP tahun 2022
2	02-02-2023	8	Evaluasi kinerja keuangan Januari 2023 dan persiapan RUPS Tahunan
3	09-03-2023	8	Evaluasi kinerja keuangan Februari 2023 dan pembahasan kerjasama dengan SMF
4	14-04-2023	8	Evaluasi kinerja keuangan Maret 2023
5	05-05-2023	8	Evaluasi kinerja keuangan April 2023 dan pembahasan penghargaan Infobank Award
6	07-06-2023	8	Evaluasi kinerja keuangan Mei 2023
7	03-07-2023	3	Evaluasi kinerja keuangan Juni 2023
8	09-08-2023	4	Evaluasi kinerja keuangan Juli 2023
9	12-09-2023	5	Evaluasi kinerja keuangan Agustus 2023 dan pembahasan peresmian perluasan gedung
10	23-10-2023	4	Evaluasi kinerja keuangan September 2023
11	07-11-2023	6	Evaluasi kinerja keuangan Oktober 2023
12	12-12-2023	5	Evaluasi kinerja keuangan November 2023

Keterangan

Rapat dilaksanakan minimal satu bulan sekali , dan dihadiri oleh dewan direksi, beberapa ada yang dihadiri dewan pengawas syariah dan pejabat eksekutif

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Drs. Nadiyah Arifin, M.Si	9	0	75,00

Keterangan

Perhitungan frekuensi rapat dewan komisaris yang terlapor adalah rapat ketika Plt Komisaris Drs. Nadiyah Arifin, M.Si mulai aktif menjabat sebagai komisaris pada bulan April 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	05-01-2023	8	Evaluasi kinerja keuangan Desember 2022 dan pembahasan hasil KAP tahun 2022
2	02-02-2023	8	Evaluasi kinerja keuangan Januari 2023 dan persiapan RUPS Tahunan
3	09-03-2023	8	Evaluasi kinerja keuangan Februari 2023 dan pembahasan kerjasama dengan SMF
4	14-04-2023	8	Evaluasi kinerja keuangan Maret 2023
5	05-05-2023	8	Evaluasi kinerja keuangan April 2023 dan pembahasan penghargaan Infobank Award
6	07-06-2023	8	Evaluasi kinerja keuangan Mei 2023
7	03-07-2023	3	Evaluasi kinerja keuangan Juni 2023
8	09-08-2023	4	Evaluasi kinerja keuangan Juli 2023
9	12-09-2023	5	Evaluasi kinerja keuangan Agustus 2023 dan pembahasan peresmian perluasan gedung
10	23-10-2023	4	Evaluasi kinerja keuangan September 2023
11	07-11-2023	6	Evaluasi kinerja keuangan Oktober 2023
12	12-12-2023	5	Evaluasi kinerja keuangan November 2023

Keterangan

Rapat dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 bulan untuk membahas evaluasi kinerja keuangan setiap bulannya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	KH Mir'an Syamsuri	6	0	50,00
2	Muhammad Aiz	11	0	91,67

Keterangan

Rapat dilaksanakan sebanyak 12 kali selama tahun 2023, dan dihadiri 50 persen oleh Ketua DPS dikarenakan alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menghadiri rapat dan tingkat kehadiran 91.67 persen oleh Anggota DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2023, tidak terdapat penyimpangan intern (Internal Fraud) didalam BPRS Patriot Bekasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Tidak terdapat permasalahan hukum di dalam BPRS Patriot Bekasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	06/01/2023	Kegiatan Sosial	Teman Patriot Berkah 06012023	Masyarakat	775.000
2	31/01/2023	Kegiatan Sosial	Pembangunan Musola	AI Muzakaroh	5.000.000
3	31/01/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Sarana Ibadah	Smpn Lima Puluh Satu	5.000.000
4	31/01/2023	Kegiatan Sosial	Hasanah Sahur Yapnin	Yapnin	5.000.000
5	31/01/2023	Kegiatan Sosial	Rat Kspps Bmt Bumi	Bmt Bumi	5.000.000
6	31/01/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Yayasan Sabulussalam	Yayasan Sabulussalam	3.000.000
7	31/01/2023	Kegiatan Sosial	Skill Competition Damkar	Damkar	10.000.000
8	31/01/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Pembangunan	Yayasan Mahad Tastbitul	3.000.000
9	09/02/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Tadabur Alam	Satpol Pp	7.000.000
10	14/02/2023	Kegiatan Sosial	Lomba Video Dokumenter	Disdik	5.000.000
11	17/02/2023	Kegiatan Sosial	Santunan Yatim	Yayasan Adilah Hakimah	5.000.000
12	17/02/2023	Kegiatan Sosial	Teman Patriot Berkah 17022023	Masyarakat	750.000
13	20/02/2023	Kegiatan Sosial	Alquran Camp	(Yayasan Gig)	500.000
14	20/02/2023	Kegiatan Sosial	Isro Miraj	Masjid Jami Attaqwa	250.000
15	22/02/2023	Kegiatan Sosial	Pekayon Culture Festival	Panitia	5.000.000
16	22/02/2023	Kegiatan Sosial	Gebyar Sehat Khairu Ummah	Khairu Ummah	3.000.000
17	23/02/2023	Kegiatan Sosial	Teman Patriot Berkah 240223	Masyarakat	775.000
18	24/02/2023	Kegiatan Sosial	Haul Kh Muchtar	Ponpes An Nur	5.000.000
19	27/02/2023	Kegiatan Sosial	Khotmul Quran 14 Ltq Iqro	Ltq Iqro	8.000.000
20	28/02/2023	Kegiatan Sosial	Santunan Yatim Piatu	Forkow Rw	5.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
21	02/03/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Dana	Masjid Al Husna	1.000.000
22	02/03/2023	Kegiatan Sosial	Baksos	Masjid Baiturahman	5.000.000
23	06/03/2023	Kegiatan Sosial	Festival Qasidah Syarikat Islam	Panitia	5.000.000
24	08/03/2023	Kegiatan Sosial	Bakti Sosial	Yayasan Al Muhajirien	5.000.000
25	09/03/2023	Kegiatan Sosial	Teman Patriot Berkah 100323	Masyarakat	750.000
26	14/03/2023	Kegiatan Sosial	Raker Mui Bekasi Utara	Mui Bekasi Utara	5.000.000
27	16/03/2023	Kegiatan Sosial	Hut Kota Bekasi	Kec Rawalumbu	1.000.000
28	21/03/2023	Kegiatan Sosial	Santunan Yatim & Dhuafa	Gmbi	250.000
29	24/03/2023	Kegiatan Sosial	Teman Patriot Berkah 240323	Masyarakat	1.000.000
30	31/03/2023	Kegiatan Sosial	Safari Ramadhan	Kec Bekasi Barat	1.000.000
31	31/03/2023	Kegiatan Sosial	Teman Patriot Berkah 310323	Masyarakat	1.000.000
32	05/04/2023	Kegiatan Sosial	Infaq Shodaqoh Jariyah	Yysn Nurul Iman	2.000.000
33	06/04/2023	Kegiatan Sosial	Buka Bersama & Santunan	Tarbiyatul Falah	7.000.000
34	12/04/2023	Kegiatan Sosial	Santunan Yatim II	Jajaka Nusantara	500.000
35	12/04/2023	Kegiatan Sosial	Santunan Yatim Rahamdhan 2023 Patriot	Masyarakat	15.000.000
36	14/04/2023	Kegiatan Sosial	Prtspk Kegiatan Rmdhn Pemuda Berbagi Sahur Dan Buk	Panitia	500.000
37	14/04/2023	Kegiatan Sosial	Santunan Yys An Naas Kota Bekasi	Yys An Naas Kota Bekasi	2.000.000
38	17/04/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Sembako Pramubakti Pemda Kota	Pramubakti Pemda Kota	3.000.000
39	17/04/2023	Kegiatan Sosial	Thr Rt007/013 Kel. Jatirahayu	Kel. Jatirahayu	500.000
40	17/04/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Santunan	Yayasan Pendidikan Albaroka	1.000.000
41	17/04/2023	Kegiatan Sosial	Donasi Untuk Yayasan Kesejahteraan Madani (Yakesma	Yayasan Kesejahteraan Madani	2.000.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
42	28/04/2023	Kegiatan Sosial	Partisipasi Tajimalela	Panitia	1.000.000
43	05/05/2023	Kegiatan Sosial	Temam Patriot Berkah 05052023	Masyarakat	700.000
44	12/05/2023	Kegiatan Sosial	Temam Patriot Berkah 12052023	Masyarakat	750.000
45	25/05/2023	Kegiatan Sosial	Pengembangan Perpustakaan Knpi	Perpustakaan Knpi	1.000.000
46	26/05/2023	Kegiatan Sosial	Temam Patriot Berkah 26052023	Masyarakat	700.000
47	29/05/2023	Kegiatan Sosial	Dukungan Kaos & Air Giat Bakti Tni	Tni	5.000.000
48	30/05/2023	Kegiatan Sosial	Turnamen Futsal Rbc 013	Panitia Futsal Rbc	1.000.000
49	30/05/2023	Kegiatan Sosial	Pembangunan Musholla Al Hidayah	Musholla Al Hidayah	2.000.000
50	08/06/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Program Penas Ktna	Panitia Program Penas Ktna	1.000.000
51	08/06/2023	Kegiatan Sosial	Temam Patriot Berkah 09062023	Masyarakat	850.000
52	09/06/2023	Kegiatan Sosial	Proposal Qurban Yysn Cahaya Kebajikan	Yysn Cahaya Kebajikan	1.000.000
53	09/06/2023	Kegiatan Sosial	Turnamen Bulutangkis Pb Enam Sembilan	Pb Enam Sembilan	1.000.000
54	12/06/2023	Kegiatan Sosial	Ssb Caringin Putra 02	Caringin Putra Dua	1.000.000
55	15/06/2023	Kegiatan Sosial	Tema Patriot Berkah 16062023	Masyarakat	750.000
56	16/06/2023	Kegiatan Sosial	Proposal Ypi Tarbiyatul Falah	Ypi Tarbiyatul Falah	2.000.000
57	20/06/2023	Kegiatan Sosial	Haul Ke 21 Ponpes An Nida	Ponpes An Nida	9.000.000
58	22/06/2023	Kegiatan Sosial	Temam Patriot Berkah 23062023	Masyarakat	750.000
59	27/06/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Qurban 2023 I	Masyarakat	8.000.000
60	27/06/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Qurban 2023 II	Masyarakat	7.000.000
61	05/07/2023	Kegiatan Sosial	Tahun Baru Islam	Majelis Zaadul Muslim	500.000
62	18/07/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Milad	Fbr	200.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
63	18/07/2023	Kegiatan Sosial	Gebyar Muharom	Gamis	1.000.000
64	18/07/2023	Kegiatan Sosial	Pembangunan Pondok Pesantren	Pp Taajurrahman	1.000.000
65	28/07/2023	Kegiatan Sosial	Lebaran Yatim	Yayasan Nurul Huda	2.000.000
66	28/07/2023	Kegiatan Sosial	Santunan Yatim Gema Muharom	Gema Muharom	1.000.000
67	28/07/2023	Kegiatan Sosial	Gebyar 78 Tahun	Perum Graha	500.000
68	04/08/2023	Kegiatan Sosial	Tajimalela Usia Kelahiran 2012	Panitia	500.000
69	09/08/2023	Kegiatan Sosial	Partisipasi Hut Ri Ke78	Waterfront Estat	500.000
70	14/08/2023	Kegiatan Sosial	Kegiatan Hut Ri Ke 78 MI Tarfal	Mi Tarfal	1.000.000
71	15/08/2023	Kegiatan Sosial	Hut Ri Ke 78 Pemuda Pancasila	Pemuda Pancasila	200.000
72	15/08/2023	Kegiatan Sosial	Hut Ri Ke 78 Abdi Negara	Abdi Negara	1.000.000
73	16/08/2023	Kegiatan Sosial	Hut Ri Ke 78 Rt007	Kel Jatirahayu	250.000
74	16/08/2023	Kegiatan Sosial	Kegiatan Hut Ri Ke 78 Kel H Sarbini	Kel H Sarbini	500.000
75	21/09/2023	Kegiatan Sosial	Teman Patriot Berkah 2192023	Masyarakat	750.000
76	05/10/2023	Kegiatan Sosial	Maulid Nabi Muhammad	Salimah	1.500.000
77	06/10/2023	Kegiatan Sosial	Maulid Nabi Sullamul Istiqomah	Sullamul Istiqomah	1.500.000
78	10/10/2023	Kegiatan Sosial	Gema Maulid	Masjid Baiturahman	500.000
79	12/10/2023	Kegiatan Sosial	Maulid Nabi Masjid An Nashr	Masjid An Nashr	600.000
80	23/10/2023	Kegiatan Sosial	Trf Donasi Kemanusiaan Untuk Palestina	Asbisindo	3.000.003
81	02/11/2023	Kegiatan Sosial	Maulid Nabi Musholla Baitul Rachman	Musholla Baitul Rachman	200.000
82	10/11/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Kejuaraan Nasional Sepaturoda	Panitia	500.000
83	10/11/2023	Kegiatan Sosial	Maulid Nabi Musola Baitul Muttaq	Musola Baitul Muttaq	500.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
84	10/11/2023	Kegiatan Sosial	Pembangunan Masjid Nurul Islam	Masjid Nurul Islam	500.000
85	14/11/2023	Kegiatan Sosial	Maulid Nabi Masjid Nurul Islam	Musola Nurul Ikhsan	1.000.000
86	29/11/2023	Kegiatan Sosial	Maulid Nabi Masjid Jami Daarul Iftitah	Masjid Jami Daarul Iftitah	500.000
87	30/11/2023	Kegiatan Sosial	Pembelian Perlengkapan Sholat Kantor BPRS Patriot	Kantor BPRS Patriot	756.000
88	08/12/2023	Kegiatan Sosial	Maulid Majelis Talim Fityatul Islam	Majlis Talim Fityatul Islam	1.000.000
89	12/12/2023	Kegiatan Sosial	Santunan Yatim Sdn Mustika Jaya Satu	Sdn Mustika Jaya Satu	500.000
90	22/12/2023	Kegiatan Sosial	Pembangunan Gapura	Abdi Negara	2.000.000
91	27/12/2023	Kegiatan Sosial	Tasyakuran Pergantian Tahun	Pemuda Pancasila	100.000

Keterangan

BPRS Patriot Bekasi senantiasa berupaya untuk selalu melakukan penyaluran dana dalam kegiatan sosial untuk membantu masyarakat, karena BPRS Patriot Bekasi sebagai banknya orang bekasi mempunyai motto teman patriot yang artinya tebar manfaat kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Bekasi

Nama BPRS	: PT. BPRS Patriot Bekasi
Periode Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Blok A3 No. 1, 2, dan 9 Jl Ahmad Yani Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan
Nomor Telepon	: 0218860708
Modal Inti	: 85.948.470.222,00
Total Aset	: 538.607.443.770,00
Bobot Faktor	: D
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: BPRS Patriot Bekasi Perseroda memiliki hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan tata kelola yang baik dalam periode tahun 2023. Meskipun ada beberapa ketentuan struktur tata kelola yang belum terpenuhi diakhir tahun 2023, tetapi hal itu tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan bisnis BPRS Patriot Bekasi. Dan kami berkomitmen akan melaksanakan Penerapan Tata Kelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : D

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,72	0,57	0,18	1,47	0.29	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT. BPRS Patriot Bekasi Sangat Baik. Meskipun belum memenuhi jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan POJK Tata Kelola
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,125	0,95	0,75	0,20	1,90	0.24	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT. BPRS Patriot Bekasi Sangat Baik. Meskipun belum memenuhi jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan POJK Tata Kelola
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,70	0,68	0,16	1,54	0.15	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) Sangat Baik
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,025	2,00	1,60	0,40	4,00	0.10	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite Kurang Baik, karena belum membentuk Komite-Komite
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.15	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS Sangat Baik
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.15	Penanganan Benturan Kepentingan di BPRS Patriot Bekasi sudah dijalankan dengan baik
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	0,90	0,80	0,20	1,90	0.14	Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPRS Patriot Bekasi sudah dijalankan dengan baik
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	0,90	0,90	0,20	2,00	0.15	Penerapan Fungsi Audit Intern di BPRS Patriot Bekasi sudah dijalankan dengan baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : D

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,80	0,17	1,47	0.04	Penerapan Fungsi Audit Ekstern di BPRS Patriot Bekasi sudah dijalankan dengan baik
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	1,00	0,92	0,10	2,02	0.15	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern sudah dilaksanakan dengan baik
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	Batas Maksimum Penyaluran Dana di BPRS Patriot Bekasi sesuai dengan ketentuan
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,50	0,40	0,10	1,00	0.05	Rencana Bisnis BPRS sudah dijalankan dengan baik
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,00	0,80	0,10	1,90	0.10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan dijalankan dengan baik
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	3	Jumlah anggota Direksi pada periode tahun 2023 sebanyak 2 orang, hal ini menyebabkan belum terpenuhinya jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan POJK Tata Kelola. Pada tahun 2023 PT. BPRS Patriot Bekasi telah mengajukan permohonan pencalonan anggota Direksi kepada OJK untuk memenuhi ketentuan struktur Tata Kelola. Tetapi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan menyetujui 1 dari 2 orang yang diajukan. Hal ini menjadikan BPRS Patriot Bekasi belum memenuhi jumlah anggota Direksi di tahun 2023.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Bekasi dekat dengan Kantor Pusat BPRS Patriot
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris BPRS Patriot
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Seluruh anggota Direksi memperoleh persetujuan OJK dan diangkat melalui RUPS.
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Seluruh anggota direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada lembaga keuangan atau lembaga lain.
6	<p>Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:</p> <p>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;</p> <p>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan</p> <p>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p>	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,43	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,72	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit internal maupun eksternal dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, OJK dan otoritas berwenang lainnya.
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	Direksi menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris dan DPS.
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	1	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung tugas dan tanggung jawab pada seluruh jenjang organisasi.
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,43	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,57	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Direksi sudah menyampaikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPRS di bidang kepegawaian
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	2	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam notulen risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi.
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	Direksi dan seluruh karyawan senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam pengelolaan BPRS
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	1	Direksi menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada PSP, OJK, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,80	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.</p>	3	Jumlah anggota Dewan Komisaris pada periode tahun 2023 sebanyak 1 orang yang menjabat sebagai Plt. Komisaris, hal ini menyebabkan belum terpenuhinya jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK Tata Kelola. Pada tahun 2023 PT. BPRS Patriot Bekasi telah mengajukan permohonan pencalonan anggota Dewan Komisaris kepada OJK untuk memenuhi ketentuan struktur Tata Kelola.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris BPRS Patriot tidak melebihi jumlah anggota Direksi
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Anggota Dewan Komisaris berdomisili di dekat kantor pusat BPRS Patriot
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.</p>	3	PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) belum memiliki Komisaris Independen. Pada periode tahun 2023, BPRS Patriot Bekasi mengajukan permohonan pencalonan anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) belum memiliki Komisaris Independen. Pada periode tahun 2023, BPRS Patriot Bekasi mengajukan permohonan pencalonan anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan OJK dan diangkat melalui RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan PE di BPRS lain atau pada lebih dari dua perusahaan lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	17	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,89	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,95	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat dan secara rutin telah dilakukan pemeriksaan secara langsung melalui pengkajian terhadap dokumen pembiayaan nasabah dan dokumen tabungan serta dokumen lainnya.
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	Dewan Komisaris menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari SKAI dan auditor ekstern.
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi.
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,88	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	Jumlah anggota DPS BPRS Patriot terdiri dari 2 orang
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	DPS tidak merangkap jabatan di lembaga keuangan syariah lainnya
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS mendapatkan fasilitas kerja
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	2	DPS memiliki pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	anggota DPS telah disetujui oleh OJK dan diangkat melalui RUPS
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		7	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,40	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		0,70	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Pengangkatan dan penggantian anggota DPS memperoleh persetujuan dari RUPS
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	DPS memberi nasihat dan saran kepada direksi dan mengawasi kegiatan BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah dan secara rutin telah dilakukan pemeriksaan secara langsung melalui pengkajian terhadap dokumen pembiayaan nasabah dan dokumen tabungan serta dokumen lainnya.
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	2	Anggota DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	2	DPS mengadakan rapat satu kali setiap bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,71	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,68	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan ke OJK tiap semester
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Laporan hasil pengawasab DPS selalu disampaikan tepat waktu atau sebelum due date berakhir
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	2	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	Rangkap Jabatan, remunerasi, dan fasilitas lain sesuai keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	anggota DPS selalu meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dalam pengawasan dalam kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,60	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,16	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	4	BPRS belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko karena periode Juni 2023, BPRS baru memasuki modal inti diatas 80 M dan akan segera membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan yang tertuang dalam POJK Tata Kelola setelah ditetapkannya pengurus secara definitif baik pada posisi Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris yang diproyeksikan akan dapat dilaksanakan melalui mekanisme RUPS-LB diawal tahun 2024.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	4	BPRS belum memiliki Komite Audit karena periode Juni 2023 BPRS baru memasuki modal inti diatas 80 M dan akan segera membentuk Komite Audit sesuai dengan yang tertuang dalam POJK Tata Kelola
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	4	BPRS belum memiliki Komite Pemantau Risiko karena periode Juni 2023, BPRS baru memasuki modal inti diatas 80 M dan akan segera membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai dengan yang tertuang dalam POJK Tata Kelola
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	4	BPRS belum membentuk Komite dan akan segera membentuk Komite-Komite sesuai dengan yang tertuang dalam POJK Tata Kelola
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	4	BPRS belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko dan akan segera membentuk komite-komite sesuai dengan yang tertuang dalam POJK Tata Kelola
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	4,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	Satuan Kerja Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	Satuan Kerja Audit Internal memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	SDM yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/ atau pemahaman mengenai produk dan/ atau aktivitas perbankan syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	2	Proses pengembangan produk dan/ atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	Standar prosedur operasional BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	2	BPRS memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian yang lengkap mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	Pengurus tidak akan mengambil tindakan yang dapat merugikan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	Apabila terdapat benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai direktur utama dan tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan OJK dan peraturan lainnya.
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	2	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen.
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	SKP memiliki pedoman kerja dan melakukan penyusunan dan pengkinian pedoman kerja.
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	SKP memiliki ketentuan intern berdasarkan POJK dan SEOJK.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan SEOJK dan POJK.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS.
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat.
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	SKP memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	SKP melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan agar sesuai dengan peraturan perundangan dan Prinsip Syariah
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan SKP berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan prinsip syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Tidak terjadi keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan perundangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	2	BPRS membentuk SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	1	SKAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	2	SKAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,80	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	2	Fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	3	BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas hasil kerja SKAI
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai.
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Melaksanakan peningkatan keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan SKAI kepada Direktur Utama dan Komisaris
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit disampaikan kepada OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern sudah disampaikan ke OJK
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Laporan pengangkatan atau pemberhentian SKAI disampaikan kepada OJK.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.</p>	1	BPRS menunjuk KAP yang terdaftar OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit disampaikan tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	Cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit.
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan hasil audit KAP disampaikan kepada OJK.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,67	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,17	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	2	BPRS Patriot Bekasi telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	2	BPRS memiliki pedoman kerja manajemen risiko
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	2	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan menyusun, mengevaluasi, dan mengembangkan pedoman penerapan manajemen risiko
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Dewan komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan lainnya terkait penerapan manajemen risiko
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	3	DPS mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dengan pemenuhan prinsip syariah
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menerapkan manajemen risiko yang diatur dalam POJK
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	2	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	16	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,29	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,92	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Laporan profil risiko sudah disampaikan kepada OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	BPRS mempunyai prosedur terkait BMPD.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan terkait BMPD.
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Proses penyaluran dana sesuai dengan ketentuan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan penyaluran dana disampaikan secara berkala kepada OJK.
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPD.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	1	RBB BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui Komisaris
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	1	RBB BPRS sesuai POJK
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	1	RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	1	RBB disusun sesuai dengan ketentuan.
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	1	RBB disampaikan kepada OJK.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem informasi yang memadai yang menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulan sesuai dengan ketentuan.
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi tahunan sesuai dengan ketentuan.
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	BPRS melaksanakan transparansi informasi sesuai POJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Patriot Bekasi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	Laporan keuangan publikasi sudah disampaikan kepada OJK.
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai ketentuan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	



PT. BPRS

Bank Syariah Patriot

BANK MILIK KOTA BEKASI (perseroda)



LEMBAR PERSETUJUAN
PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2023

Nama BPRS : PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda)
Alamat BPRS : Ruko Sentral Niaga Kalimalang Blok A3 No. 1, 2 dan 9
Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kayuringin
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi – 17144
Telepon : (021) 8860708
E-mail : admin@bprspatriot.com
Tanggal Awal Periode : 01 Januari 2023
Tanggal Akhir Periode : 31 Desember 2023
Modal Inti : Rp. 85.948.470.222,-
Asset Total : Rp. 538.607.443.770,-
Bobot BPRS : D

Setelah membaca dan mengkaji Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) Tahun 2023. Maka dengan ini kami menyetujui Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bekasi, 25 Januari 2024

PT. BPRS PATRIOT BEKASI (PERSERODA)


Fasihul Islam
Direktur Utama

PT. BPRS

Bank Syariah Patriot

BANK MILIK KOTA BEKASI (perseroda)



Drs. Nadih Arifin, M.Si
Komisaris Utama

Kantor Pusat :

- Ruko Sentral Niaga Kalimalang, Blok A3 No. 1 Jl. Ahmad Yani Kayu Ringin Bekasi Selatan Kota Bekasi
Telp.: 021-8880708 Fax : 021-8861054

Kantor Kas :

- Bekasi Timur, Ruko Mitra Pratama, Blok G No. 2 Pasar Baru. Jln. Ir. Juanda Duren Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi
Telp./Fax : 021-88351351
- Pondok Melati, Jl. Pasar Kencana No. 2 (Jl. KH. Saiman) RT.007 RW. 013 Kp. Rawa Bacang, Jati Rahayu, Pondok Melati
- Jalan Raya Bantar Gebang Blok 7A



PT. BPRS

Bank Syariah Patriot

BANK MILIK KOTA BEKASI (perseroda)

